

**EFEKTIVITAS PENGGUNAAN APLIKASI SISTEM KEUANGAN DESA
(SISKEUDES) DALAM MENINGKATKAN TRANSPARANSI DAN
AKUNTABILITAS DI KANTOR DESA BAHUNGIN KECAMATAN
KELUA KABUPATEN TABALONG**

PROPOSAL SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana (S1) Pada Jurusan Administrasi Publik



Oleh

BAHRUL AZMI

NPM : 2022509

**SEKOLAH TINGGI ILMU ADMINISTRASI
AMUNTAI**

2026

TANDA PERSETUJUAN

Menerangkan Mahasiswa dibawah ini atas nama :

NAMA : BAHRUL AZMI
NPM : 2022509
PROGRAM : ADMINISTRASI PUBLIK
JUDUL SKRIPSI : EFEKTIVITAS PENGGUNAAN APLIKASI SISTEM KEUANGAN DESA (SISKEUDES) DALAM MENINGKATKAN TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS DI KANTOR DESA BAHUNGIN KECAMATAN KELUA KABUPATEN TABALONG.

Setelah diseminarkan dan diadakan perbaikan seperlunya, kami dapat menyetujui proposal skripsi atas nama diatas untuk dilanjutkan ke pembimbingan Skripsi pada Program Studi Administrasi Publik Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Amuntai.

Amuntai, 13 April 2026

PEMBIMBING I



Dr. Irza Setiawan, S.Sos M.AP.
NUPTK. 9456765666137023

PEMBIMBING II



Herry Febriadi, SH, MH, CPRM.
NUPTK. 8557767668131032



Mengetahui
Ketua Prodi Administrasi Publik,

Ahmad Baihaqi, S. Sos, M.A.
NIK. 199211042015091 021

KATA PENGANTAR

Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, sholawat serta salam tetap tercurah kepada junjungan Nabi Besar Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat beliau serta pengikutnya hingga akhir zaman. Syukur Alhamdulillah, atas rahmat dan hidayah yang diberikan oleh Allah SWT sehingga penulis dapat menyelesaikan proposal skripsi yang berjudul **“EFEKTIVITAS PENGGUNAAN APLIKASI SISTEM KEUANGAN DESA DALAM MENINGKATKAN TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS DI KANTOR DESA BAHUNGIN KECAMATAN KELUA KABUPATEN TABALONG”** Proposal skripsi ini merupakan salah satu syarat yang diajukan untuk memenuhi tugas akhir pada Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai. Penulis menyadari bahwa penyusunan proposal skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Penulis juga menyadari bahwa penulisan proposal skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Meskipun demikian, penulis berusaha semaksimal mungkin agar penyusunan proposal skripsi ini berhasil dengan sebaik-baiknya sehingga dapat diterima dan disetujui pada saat sidang seminar proposal.

Bersama ini pula dengan segala kerendahan hati, penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada :

1. Bapak Dr. Reno Affrian, S.Sos, M.AP., CIQnR selaku ketua Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai.
2. Bapak Ahmad Baihaqi, S.Sos, M.AP selaku ketua program Administrasi Publik.

3. Bapak Dr. Irza Setiawan, S.Sos M.AP. selaku Dosen pembimbing I yang telah banyak membantu, memberikan pengarahan, bimbingan dan petunjuk kepada penulis sehingga proposal skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
4. Bapak Herry Febriadi, SH, MH, CPRM. selaku Dosen Pembimbing II yang telah banyak membantu, memberikan pengarahan, bimbingan dan petunjuk kepada penulis sehingga proposal skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
5. Bapak Drs. Muhammad Nasib selaku Kepala Desa Bahungin Kecamatan Kelua Kabupaten Tabalong yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian.
6. Bapak Fakhrijal Mujaza selaku Operator yang mengelola aplikasi Siskeudes di Kantor Desa Bahungin Kecamatan Kelua Kabupaten Tabalong yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian dan bersedia memberikan informasi tentang aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes).
7. Seluruh dosen, staf tata usaha beserta jajarannya yang ada di Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai.
8. Kedua orang tua yang saya cintai dan sayangi yaitu Bapak Jam'an dan Ibu Latifah yang telah memberikan motivasi, do'a dan dukungan dana sehingga penulisan skripsi ini berjalan dengan baik dan lancar.
9. Seluruh keluarga dan teman-teman saya yang telah banyak membantu dan mendukung saya dalam penyelesaian proposal ini.

Penulis menyadari bahwa proposal skripsi ini jauh dari kata sempurna, baik dari penulisan maupun isi yang disampaikan, hal ini dikarenakan keterbatasan kemampuan yang dimiliki penulis dalam penyusunan proposal skripsi, Oleh karena itu penulis memohon untuk dapat memakluminya. Kritik dan saran serta tanggapan yang bersifat membangun akan penulis terima demi kesempurnaan proposal skripsi ini.

Tabalong, April 2026

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR GAMBAR.....	ix
DAFTAR TABEL	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar belakang.....	1
B. Fokus Penelitian.....	5
C. Rumusan Masalah	5
D. Tujuan Penelitian.....	6
E. Manfaat Penelitian	6
BAB II LANDASAN TEORI.....	8
A. Hasil Penelitian Terdahulu	8
B. Tinjauan Teoritis.....	12
1. Efektivitas	12
a. Pengertian Efektivitas.....	12
b. Pengukuran Efektivitas	16
c. Faktor yang mempengaruhi Efektivitas	19
2. Tinjauan Tentang Desa.....	22
a. Pengertian Desa	22
b. Pemerintahan Desa	24
c. Sumber Keuangan Desa	27

d. Penggunaan Aplikasi Sistem Keuangan Desa	28
1) Pengertian Penggunaan	28
2) Pengertian Aplikasi Sistem Keuangan Desa	29
3. Transparansi	31
4. Akuntabilitas.....	34
C. Kerangka Pemikiran.....	35
BAB III METODE PENELITIAN.....	38
A. Lokasi Penelitian.....	38
B. Pendekatan Penelitian.....	38
C. Tipe Penelitian.....	39
D. Data dan Sumber Data.....	40
1. Data.....	40
a. Data Primer.....	40
b. Data Sekunder	42
2. Sumber Data.....	43
E. Desain Operasional Variabel	44
F. Teknik Pengumpulan Data.....	46
1. Observasi	46
2. Wawancara	47
3. Dokumentasi.....	48
G. Teknik Analisis Data	48
1. Data Reduction (Reduksi Data).....	48
2. Data Display (Penyajian Data).....	49
3. Conclusion Drawing (Menarik Kesimpulan).....	49
H. Uji Kredibilitas Data	49
1. Perpanjang Pengamatan.....	49

2. Meningkatkan Ketekunan.....	50
3. Triangulasi	50
4. Analisis Kasus Negatif.....	50
5. Menggunakan Bahan Referensi	51
6. Mengadakan Membercheck	51

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran	37
--	-----------

DAFTAR TABEL

Tabel 3. 1 Data Informan Penelitian	44
Tabel 3. 2 Desain Operasional Variabel.....	46

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Desa Menurut asal katanya berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu "dhesi" yang berarti tanah kelahiran. Jadi, desa tidak hanya dilihat penampakan sebutan desa fisiknya saja, tetapi juga dimensi sosial budayanya. Desa yang berarti tanah kelahiran selain menunjukkan tempat atau daerah juga menggambarkan kehidupan sosial budaya dan kegiatan penduduknya.

Menurut UU Nomor 6 Tahun 2014, desa diartikan sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2018 pasal 1 ayat 5 tentang keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Dalam mengelola keuangan desa diberikan kebebasan dalam menyusun laporan keuangan. Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan dan efektif terkait transaksi keuangan dari kegiatan ekonomi lainnya yang dilaksanakan oleh pemerintah desa.

Seiring berkembangnya zaman, pemanfaatan teknologi informasi tidak hanya menjadi kebutuhan, tetapi juga telah menjadi tuntutan dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Penerapan teknologi informasi dalam pemerintahan dikenal dengan konsep e-government, yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Pemerintah Indonesia terus berupaya mengembangkan sistem pemerintahan berbasis elektronik hingga ke tingkat desa. Desa sebagai unit pemerintahan terkecil memiliki peran penting dalam mendukung pembangunan nasional. Selain itu, desa juga diberikan sumber pendanaan yang cukup besar melalui dana desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Besarnya dana yang diterima oleh desa menuntut adanya pengelolaan keuangan yang baik, transparan, dan akuntabel. Pengelolaan keuangan desa yang tidak dilakukan secara optimal dapat menimbulkan berbagai permasalahan, seperti penyalahgunaan anggaran, rendahnya kepercayaan masyarakat, serta tidak tercapainya tujuan pembangunan desa secara maksimal. Oleh karena itu, diperlukan suatu sistem yang mampu membantu pemerintah desa dalam mengelola keuangan secara tertib, efektif, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Transparansi dan akuntabilitas merupakan dua prinsip utama dalam pengelolaan keuangan publik. Transparansi mengandung arti keterbukaan

informasi kepada masyarakat terkait dengan pengelolaan keuangan, sehingga masyarakat dapat mengetahui dan mengawasi jalannya pemerintahan desa. Sementara itu, akuntabilitas merupakan bentuk pertanggungjawaban pemerintah desa atas pengelolaan keuangan yang dilakukan, baik secara administratif maupun secara moral kepada masyarakat. Kedua prinsip ini menjadi sangat penting dalam mewujudkan pemerintahan desa yang bersih dan bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Dalam rangka mendukung pengelolaan keuangan desa yang transparan dan akuntabel, pemerintah melalui Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) bekerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri telah mengembangkan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes). Aplikasi ini dirancang untuk membantu pemerintah desa dalam seluruh proses pengelolaan keuangan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, hingga pertanggungjawaban keuangan desa. Dengan adanya aplikasi ini, diharapkan pengelolaan keuangan desa dapat dilakukan secara lebih sistematis, terintegrasi, dan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

Menurut teori sistem informasi yang dikemukakan oleh Jogiyanto, keberhasilan suatu sistem informasi tidak hanya ditentukan oleh kecanggihan teknologi yang digunakan, tetapi juga oleh sejauh mana sistem tersebut dapat diterima dan dimanfaatkan oleh pengguna (user). Hal ini mencakup kemudahan penggunaan (ease of use), kebermanfaatan (usefulness), serta kemampuan sistem dalam meningkatkan kinerja organisasi. Oleh karena itu, efektivitas penggunaan aplikasi Siskeudes menjadi faktor penting dalam menentukan

keberhasilan implementasinya di tingkat desa.

Desa Bahungin yang berada di Kecamatan Kelua Kabupaten Tabalong merupakan salah satu desa yang telah menerapkan aplikasi Siskeudes dalam pengelolaan keuangannya. Penerapan aplikasi ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan desa, khususnya dalam hal transparansi dan akuntabilitas. Efektivitas penggunaan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) merupakan hal yang penting untuk dikaji lebih lanjut. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui sejauh mana aplikasi Siskeudes telah digunakan secara efektif dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa di Kantor Desa Bahungin Kecamatan Kelua Kabupaten Tabalong. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam upaya peningkatan kualitas tata kelola keuangan desa serta menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah desa dalam mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi.

Berdasarkan Observasi awal tersebut, maka penulis mendapatkan permasalahan yang muncul untuk dikaji dalam penelitian ini, adapun fenomenanya adalah:

1. Adanya kendala teknis seperti jaringan internet kurang stabil yang selalu dihadapi oleh perangkat desa dalam mengoperasikan aplikasi sistem keuangan desa. (*Sumber:Observasi Penulis, Tahun 2026*)
2. Masih terjadi keterlambatan dalam penyusunan laporan (*Sumber:Observasi Penulis, Tahun 2026*)
3. Adanya kendala dalam proses penginputan data yang masih memerlukan

waktu yang cukup lama (*Sumber:Observasi Penulis, Tahun 2026*)

Berdasarkan permasalahan diatas, maka penulis tertarik untuk mengkaji dan meneliti permasalahan tersebut dalam judul penelitian **"EFEKTIVITAS PENGGUNAAN APLIKASI SISTEM KEUANGAN DESA (SISKEUDES) DALAM MENINGKATKAN TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS DI KANTOR DESA BAHUNGIN KECAMATAN KELUA KABUPATEN TABALONG"**

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan uraian dari permasalahan pada latar belakang, maka untuk membatasi permasalahan yang akan diteliti, agar penelitian ini lebih terarah dan tidak melenceng terlalu jauh. Penulis memfokuskan penelitian tentang efektivitas yang menggunakan Teori E-government Modern Menurut United Nations (2018-2022) yaitu:

1. Transparansi
2. Akuntabilitas
3. Efesiensi

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana efektivitas penggunaan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas di Kantor Desa Bahungin Kecamatan Kelua Kabupaten Tabalong?
2. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi Efektivitas penggunaan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas di Kantor Desa Bahungin Kecamatan Kelua

Kabupaten Tabalong?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk Mengetahui bagaimana efektivitas penggunaan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas di Kantor Desa Bahungin Kecamatan Kelua Kabupaten Tabalong.
2. Untuk Mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi efektivitas penggunaan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas di Kantor Desa Bahungin Kecamatan Kelua Kabupaten Tabalong.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis, yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang administrasi publik dan sistem informasi pemerintahan desa. Selain itu, penelitian ini dapat menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya yang ingin mengkaji tentang efektivitas penggunaan teknologi informasi, khususnya Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes), dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.

2. Manfaat Praktis

- Bagi Pemerintah Desa

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah Desa Bahungin dalam meningkatkan efektivitas penggunaan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes), khususnya dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.

- Bagi Perangkat Desa

Penelitian ini dapat memberikan pemahaman mengenai pentingnya pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan keuangan desa serta meningkatkan kemampuan dalam mengoperasikan aplikasi Siskeudes secara optimal.

- Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat mengenai pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa, sehingga masyarakat dapat berperan aktif dalam melakukan pengawasan.

- Bagi Peneliti

Penelitian ini menjadi sarana untuk menambah wawasan dan pengalaman dalam melakukan penelitian ilmiah, khususnya yang berkaitan dengan pemanfaatan teknologi informasi dalam pemerintahan desa.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Hasil Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian ini hasil penelitian terdahulu digunakan sebagai bahan untuk membantu mendapatkan gambaran dalam penelitian, disamping untuk mengetahui persamaan dan perbedaan penelitian dan faktor-faktor penting lainnya yang dapat dijadikan sebagai landasan kajian untuk dapat mengembangkan wawasan berpikir peneliti. Dimana peneliti mengambil penelitian sebelumnya, yaitu:

1. Penelitian Herliana Mely (2021) mahasiswa Universitas Jenderal Soederman jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik judul penelitian ini adalah **“Efektivitas Penerapan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) dalam Pengelolaan Laporan Keuangan Desa di Kecamatan Embaloh Hilir Kabupaten Kapuas Hulu”**. Efektivitas Penerapan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) dalam pengelolaan laporan keuangan desa di Desa Kirin Nangka, Desa Nangka Palin, Desa Keliling Semulung, Desa Ujung Bayur, dan Desa Nanga Embaloh. Penelitian dilatar belakangi oleh rendahnya kualitas sumber daya manusia dan insfrastruktur penunjang dalam proses pengelolaan keuangan desa menggunakan aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes). Tujuan penelitian ini untuk mengetahui efektivitas penerapan aplikasi siskeudes dalam pengelolaan laporan keuangan desa. Metode penelitian menggunakan karakteristik penelitian

kualitatif dengan sifat deskriptif. data dikumpulkan dengan melakukan wawancara kepada lima belas informan Pemerintah Desa (Kepala Desa, Kaur Keuangan, dan Sekretaris Desa), observasi, dan dokumentasi. Analisis data menggunakan model interaktif dan bersiklus dari Miles, Huberman, dan Saldana tahun 2018 terdiri atas tiga aliran (1) Kondensasi data, (2) Penyajian data, (3) Penarikan kesimpulan/verifikasi. Menggunakan indikator Efektivitas Menurut Makmur tahun 2015. Hasil Penelitian menunjukkan Efektivitas Penerapan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) dalam Pengelolaan Laporan Keuangan Desa telah efektif dalam ketepatan penentuan waktu, ketepatan dalam pengukuran, ketepatan dalam berpikir, ketepatan dalam melakukan perintah, ketepatan dalam menentukan tujuan, dan ketepatan sasaran. Namun, tidak efektif pada ketepatan perhitungan biaya dan ketepatan dalam menentukan pilihan pada infrastruktur penunjang desa khusus Desa Kirin Nangka, Desa Keliling Semulung, dan Desa Ujung Bayur dalam pengelolaan keuangan desa menggunakan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes). Infrastruktur penunjang seperti jaringan internet dan listrik sangat berdampak terhadap kinerja pemerintahan desa dalam pengelolaan laporan keuangan desa menggunakan aplikasi Siskeudes. Dan pengetahuan operator aplikasi Siskeudes tentang teknologi informasi sangat berdampak terhadap proses pengelolaan laporan keuangan desa menggunakan aplikasi Siskeudes.

Secara umum pada efektivitas pengelolaan laporan akhir Desa Kirin Nangka, Desa Nangka Palin, Desa Keliling Semulung, Desa Ujung Bayur, dan Desa Nanga Embaloh telah efektif dalam pengelolaan laporan keuangan desa menggunakan aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes).

2. Penelitian Abdurrahman Wahid (2023) mahasiswa STIA Amuntai Program Administrasi Publik judul penelitian ini adalah **“Efektivitas Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Pada Kantor Desa Pematang Kecamatan Banua Lawas Kabupaten Tabalong”**. Pemerintah mengembangkan aplikasi siskeudes ini untuk membantu pemerintahan desa lebih mandiri dalam pengelolaan keuangan desa secara efektif dan efisien serta meningkatkan transparansi dalam Akuntabilitas keuangan Pada Kantor Desa. Berdasarkan hal di atas, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah efektifnya aplikasi tersebut, faktor apa saja yang mempengaruhi, dan apa saja upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe deskriptif-kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi dan dokumentasi. Sumber data diambil melalui penarikan sampel secara Purposive Sampling berjumlah orang. Setelah data terkumpul kemudian dianalisis dengan teknik meliputi reduksi data, penyajian data, dan verifikasi atau penarikan sampel. Hasil dari penelitian ini

menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan efektivitas aplikasi sistem keuangan desa (siskeudes) pada kantor desa pematang kecamatan banua lawas kabupaten tabalong belum efektif dilaksanakan. Adapun efektifnya aplikasi siskeudes ini sudah efektif berjalan Pertama, pada sub variabel keberhasilan program pada indikator kemampuan operasional dalam program. Kedua, pada sub variabel keberhasilan sasaran pada indikator pencapaian program, dan kebijakan prosedur. Ketiga, pada sub variabel kepuasan terhadap program pada indikator kepuasan yang dirasakan, dan kualitas yang dihasilkan. Keempat, pada sub variabel tingkat input dan output pada indikator efisien, dan efektif. Kelima, pada sub variabel Pencapaian tujuan menyeluruh pada indikator melakukan tugas, penilaian program, dan efektivitas program. Adapun yang belum efektif berjalan yaitu pada sub variabel kepuasan terhadap program pada indikator kebutuhan. Di samping itu faktor yang mempengaruhi efektivitas aplikasi siskeudes yaitu pada sub variabel kepuasan terhadap program pada indikator kebutuhan yang mana dalam kebutuhannya ini berupa jaringan atau sinyal. Adapun upaya yang dilakukan agar efektivitas aplikasi siskudes yaitu pada sub variabel kepuasan terhadap program pada indikator kebutuhan maka pemerintah desa pematang melakukan pembelian berupa modem wifi agar pelaksanaan aplikasi siskeudes dapat berjalan secara baik.

B. Tinjauan Teoritis

1. Efektivitas

a. Pengertian Efektivitas

Kata efektif berasal dari bahasa Inggris yaitu *effective* yang artinya berhasil atau sesuatu yang dilakukan dengan sukses. Kamus ilmiah populer mendefinisikan efektivitas sebagai kesesuaian penggunaan, hasil guna atau dukungan untuk tujuan. Efektivitas merupakan unsur utama untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan dalam setiap organisasi, kegiatan atau program. Dikatakan efektif jika tujuan atau sasaran tercapai seperti yang telah ditentukan.

Secara umum, efektivitas diartikan sebagai seberapa jauh tercapainya suatu tujuan yang terlebih dahulu ditentukan. Konsep efektivitas selalu dikaitkan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya telah dicapai.

Adapun Martoyo dalam Asri Wijayanti dkk, (2018:97) memberikan definisi efektivitas dapat pula diartikan sebagai suatu kondisi atau keadaan, dimana dalam memilih tujuan yang hendak dicapai dan sarana yang digunakan, serta kemampuan yang dimiliki merupakan tepat, sehingga tujuan yang diinginkan dapat dicapai dengan hasil yang memuaskan.

Anis Zohriah (2023:90) menyimpulkan bahwa yang menjadi penekanan dari pengertian efektivitas berada pada pencapaian

tujuan. Artinya sebuah program baru dapat dikatakan efektif ketika tujuan atau sasaran yang dikehendaki dapat tercapai sesuai dengan apa yang sudah direncanakan sebelumnya. Ketika tujuan atau sasaran tersebut tercapai, maka akan menimbulkan dampak positif sebagaimana yang diharapkan. Namun, jika usaha atau hasil pekerjaan yang dilakukan tidak tercapai sesuai dengan apa yang direncanakan, maka hal itu dikatakan tidak efektif.

Efektivitas berdasarkan pengertian merupakan pencapaian sasaran yang telah disepakati atas usaha bersama. (Gibson dalam Asri Wijayanti dkk, 2018:97).

James L. Gibson dkk dalam Harbani Pasolong (2022:4) mengatakan bahwa efektivitas adalah pencapaian sasaran dari upaya bersama.

Keban menambahkan bahwa suatu organisasi dapat dikatakan efektif kalau tujuan organisasi atau nilai-nilai sebagaimana ditetapkan dalam visi tercapai.

Menurut Mardiasmo dalam Ratna Ekasari (2020:20) efektivitas merupakan hubungan antara keliaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai. Kegiatan operasional dikatakan efektif apabila proses kegiatan mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan.

Menurut pandangan Dunn dalam Eko Indra Heri (2020: 183) efektivitas berkenaan dengan apakah suatu alternatif mencapai hasil

(akibat) yang diharapkan, atau mencapai tujuan yang ditetapkan.

Menurut Rinni Wardani dalam bukunya yang berjudul Pengantar Manajemen Teori dan Aplikasi (2024:128) menjelaskan bahwa pengertian efektivitas mengacu pada pencapaian tujuan. Efektivitas itu berkaitan dengan tercapainya kinerja yang maksimal, yaitu arti mencapai tujuan yang berkaitan dengan kualitas, kuantitas dan waktu.

Menurut Steer dalam Niken Wulandari dkk (2024:9) efektivitas adalah mengerjakan sesuatu dengan akurat, tepat waktu, obyektif dan menyeluruh sesuai dengan tujuan organisasi.

Pandangan lain di kemukakan oleh Sughandadalam Aswar Annas (2017:74) bahwa efektivitas adalah pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah pekerjaan tepat pada waktunya.

Sedangkan Menurut Halim dalam Ratna Ekasari (2020:20-21) efektivitas adalah hubungan antara output pusat tanggung jawabnya dan tujuannya. Makin besar kontribusi output terhadap tujuan, makin efektiflah satu unit tersebut.

Siagian dalam Aswar Annas (2017:74) berpendapat bahwa efektivitas adalah pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk

menghasilkan sejumlah barang dan jasa kegiatan yang dijalankannya.

Steers dalam Asri Wijayanti dkk (2018:97) mengemukakan bahwa efektivitas merupakan jangkauan usaha suatu program sebagai suatu sistem dengan sumber daya dan sarana tertentu untuk memenuhi tujuan dan sasaran tanpa melumpuhkan cara dan sumber daya itu serta tanpa memberi tekanan yang tidak wajar terhadap pelaksanaannya.

The Liang Gie dalam Dian Purwanti (2022:42) berpendapat bahwa efektivitas adalah suatu keadaan yang mengandung pengertian mengenai terjadinya suatu efek atau akibat yang dikehendaki, kalau seseorang melakukan suatu perbuatan dengan maksud tertentu yang memang dikehendaki.

Winardi dalam Dian Purwanti (2022:46) menjelaskan bahwa efektivitas adalah hasil yang dicapai seorang pekerja dibandingkan dengan hasil produksi lain dalam jangka waktu tertentu.

Apabila kita analisa kutipan ini, maka efektivitas adalah hasil yang diperoleh seorang pekerja dan dibandingkan dengan waktu yang dipergunakan untuk menghasilkan barang/jasa tersebut.

Berdasarkan pendapat para ahli diatas, maka dapat disimpulkan bahwa efektivitas merupakan cara untuk mengukur program atau

suatu kegiatan apakah sudah mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan yang telah ditetapkan oleh organisasi.

b. Pengukuran Efektivitas

Pengukuran efektivitas adalah proses menilai sejauh mana suatu kegiatan, program, atau kebijakan mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam pengukuran efektivitas ini diperlukan indikator atau alat ukur efektivitas.

Tingkat efektivitas juga dapat diukur dengan membandingkan antara rencana yang telah ditentukan dengan hasil nyata yang telah diwujudkan. Namun, jika usaha atau hasil pekerjaan dan tindakan yang dilakukan tidak tepat sehingga menyebabkan tujuan tidak tercapai atau sasaran yang diharapkan, maka hal itu dikatakan tidak efektif.

Sementara itu, Sharma dalam Tangkilisan dalam Dian Purwanti (2022: 45). Memberikan kriteria atau ukuran efektivitas organisasi yang menyangkut faktor internal organisasi dan faktor eksternal organisasi antara lain:

- 1) Produktivitas organisasi atau output
- 2) Efektivitas organisasi dalam bentuk keberhasilannya menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan di dalam dan di luar organisasi
- 3) Tidak adanya ketegangan di dalam organisasi atau hambatan-hambatan konflik diantara bagian-bagian organisasi.

Sedangkan Steers dalam Tangkilisan dalam Dian Purwanti (2022: 45) mengemukakan lima kriteria dalam pengukuran efektivitas organisasi yaitu:

- 1) Produktivitas
- 2) Kemampuan adaptasi atau fleksibilitas
- 3) Kepuasan kerja
- 4) Kemampuan berlaba
- 5) Pencarian sumber daya.

Gibson dalam Tangkilisan dalam Dian Purwanti (2022: 45) mengatakan hal yang berbeda bahwa efektivitas organisasi dapat pula diukur melalui:

- 1) Kejelasan tujuan yang hendak dicapai
- 2) Kejelasan strategi pencapaian tujuan
- 3) Proses analisis dan perumusan kebijaksanaan yang mantap
- 4) Perencanaan yang matang
- 5) Penyusunan program yang tepat
- 6) Tersedianya sarana dan prasarana
- 7) Sistem pengawasan dan pengendalian yang bersifat mendidik.

Menurut Cambel J.P dalam Dedi Amrizal, Dkk (2018;41), pengukuran efektivitas secara umum dan yang paling menonjol adalah :

- 1) Keberhasilan program
- 2) Keberhasilan sasaran

- 3) Kepuasan terhadap program
- 4) Tingkat input dan output
- 5) Pencapaian tujuan menyeluruh

Teori E-Government Modern menjelaskan bahwa pemanfaatan teknologi informasi dalam pemerintahan bertujuan untuk meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), melalui penerapan sistem digital dalam pelayanan publik dan administrasi pemerintahan.

Menurut United Nations (2018-2022), e-government tidak hanya berfokus pada penggunaan teknologi, tetapi juga pada peningkatan:

- 1) Transparansi
- 2) Akuntabilitas
- 3) Efisiensi

Dalam konteks ini, aplikasi Siskeudes merupakan bentuk implementasi e-government di tingkat desa yang digunakan untuk mengelola keuangan desa secara digital.

Secara umum, penggunaan Siskeudes di Kantor Desa Bahungin sebagai berikut:

- Meningkatkan transparansi, karena data keuangan desa dapat disusun secara sistematis dan lebih mudah diakses
- Mendorong akuntabilitas, karena setiap transaksi keuangan tercatat dan dapat dipertanggungjawabkan
- Meningkatkan efisiensi, karena proses pencatatan dan pelaporan

menjadi lebih cepat dibandingkan manual.

c. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas

Faktor yang mempengaruhi efektivitas Menurut Hasibuan dalam Samsudin Dkk dalam Kartika Febri Yuliani (2017:31) mengatakan ada beberapa faktor yang mempengaruhi efektifivitas program, antara lain:

1) Kualitas Aparatur

Kualitas sumber daya manusia pada dasarnya adalah tingkat pengetahuan, kemampuan dan kemauan yang terdapat pada sumber daya manusia.

2) Kompetensi Administator

Kemampuan adalah kapasitas individu untuk melaksanakan berbagai tugas dalam pekerjaan tertentu.

3) Sarana Prasarana

Sarana dan prasarana merupakan penunjang atau peralatan kerja dalam hal ini termasuk dalam pengertian sarana prasarana adalah bagian penting dan ikut menentukan terselenggaranya aktivitas.

Menurut Samsudin dalam Kartika Febri Yuliani (2017:31) bahwa faktor sarana dan prasarana diartikan sebagai peralatan penting dalam penyelenggaraan aktivitas pemerintah, dalam hal ini sarana digunakan untuk mempermudah atau memperlancar gerak dan aktivitas pemerintah.

4) Pengawasan

Pengawasan adalah satu diantara fungsi manajemen yang merupakan proses kegiatan pemimpin untuk memastikan dan menjamin bahwa tujuan dan tugas dalam sebuah lembaga akan terlaksana dengan baik sesuai dengan kebijakan, intruksi, rencana dan ketentuan-ketentuan yang berlaku.

Sedangkan M. Richard Steer dalam Siti Marlida berpendapat (2022:14-16) Ada empat faktor yang dapat mempengaruhi efektivitas yaitu:

- 1) Karakteristik Organisasi adalah hubungan yang sifatnya relatif tetap seperti susunan sumber daya manusia yang terdapat dalam organisasi. Struktur merupakan cara yang unik menempatkan manusia dalam rangka menciptakan sebuah organisasi. Dalam struktur, manusia ditempatkan sebagai bagian dari suatu hubungan yang relatif tetap yang akan menentukan pola interaksi dan tingkah laku yang berorientasi pada tugas.
- 2) Karakteristik Lingkungan mencakup dua aspek. Aspek pertama adalah lingkungan ekstern yaitu lingkungan yang berada di luar batas organisasi dan sangat berpengaruh terhadap organisasi, terutama dalam pembuatan keputusan dan pengambilan tindakan. Aspek kedua adalah lingkungan intern yang dikenal sebagai iklim organisasi yaitu lingkungan yang secara keseluruhan dalam lingkungan organisasi.

- 3) Karakteristik Pekerja merupakan faktor yang paling berpengaruh terhadap efektivitas. Di dalam diri setiap individu akan ditemukan banyak perbedaan, akan tetapi kesadaran individu akan perbedaan itu sangat penting dalam upaya mencapai tujuan organisasi. Jadi apabila suatu organisasi menginginkan keberhasilan, organisasi tersebut harus dapat mengintegrasikan tujuan individu dengan tujuan organisasi.
- 4) Karakteristik Manajemen adalah strategi dan mekanisme kerja yang dirancang untuk mengkondisikan semua hal yang di dalam organisasi sehingga efektivitas tercapai. Kebijakan dan praktek manajemen merupakan alat bagi pimpinan untuk mengarahkan setiap kegiatan guna mencapai tujuan organisasi. Dalam melaksanakan kebijakan dan praktek manajemen harus memperhatikan manusia, tidak hanya mementingkan strategi dan mekanisme kerja saja. Mekanisme ini meliputi penyusunan tujuan strategis, pencarian dan pemanfaatan atas sumber daya, penciptaan lingkungan prestasi, proses komunikasi, kepemimpinan dan pengambilan keputusan, serta adaptasi terhadap perubahan lingkungan inovasi organisasi, karakteristik lingkungan, karakteristik pekerja dan karakteristik manajemen.

2. Tinjauan tentang Desa

a. Pengertian Desa

Desa Menurut asal katanya berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu "dhesi" yang berarti tanah kelahiran. Jadi, desa tidak hanya dilihat penampakan sebutan desa fisiknya saja, tetapi juga dimensi sosial budayanya.

Desa yang berarti tanah kelahiran selain menunjukkan tempat atau daerah juga menggambarkan kehidupan sosial budaya dan kegiatan penduduknya.

Desa adalah bentuk pemerintahan terkecil yang ada di negeri ini. Luas wilayah desa biasanya tidak terlalu luas dan dihuni oleh sejumlah keluarga. Mayoritas penduduknya bekerja di bidang agraris dan tingkat pendidikannya cenderung rendah. Karena jumlah penduduknya tidak begitu banyak, hubungan kekerabatan antarmasyarakatnya biasanya terjalin kuat. Para masyarakatnya juga masih percaya dan memegang teguh adat dan tradisi yang ditinggalkan para leluhur mereka.

Pengertian desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyatakan bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menurut Sutardjo Kartodikusumo dalam Ick Ranga Bawono dan Erwin Setyadi (2019:02), pengertian desa adalah suatu kesatuan hukum di mana bertempat tinggal suatu masyarakat yang berkuasa mengadakan pemerintahan sendiri.

Berbeda dengan Landis dalam Ick Ranga Bawono dan Erwin Setyadi (2019:02) yang mendefinisikan desa sebagai suatu wilayah yang penduduknya kurang dari 2.500 jiwa dengan ciri-ciri sebagai berikut :

- 1) Mempunyai pergaulan hidup yang saling mengenal
- 2) Adanya ikatan perasaan yang sama tentang kebiasaan
- 3) Cara berusaha bersifat agraris dan sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor alam.

Dari beberapa pengertian dan definisi di atas, kesimpulan yang dapat diambil mengenai beberapa ciri kehidupan Pada Kantor Desa adalah sebagai berikut :

- 1) Mempunyai wilayah sendiri;
- 2) Mempunyai sistem masyarakat sendiri;
- 3) Kehidupan sangat erat dengan lingkungan alam;
- 4) Sifat gotong-royong masih tertanam kuat pada warga masyarakat desa;
- 5) Masyarakat desa merupakan paguyuban (gemeinschaft), yaitu gaya hidup berdasarkan ikatan kekeluargaan yang kuat;
- 6) Struktur ekonominya bersifat agraris;

- 7) Jumlah penduduk tidak terlalu banyak dan luas daerah tidak terlalu besar;
- 8) Proses sosial berjalan lambat;
- 9) Kehidupan bersifat tradisional;
- 10) Tata pemerintahan dipimpin oleh kepala desa yang dipilih oleh rakyatnya;

b. Pemerintahan Desa

1) Kepala Desa

Kepala desa adalah Pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili pemerintah desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan. Kepala desa memiliki kewenangan yaitu :Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa, menetapkan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD), menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa, menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APBDesa, dan melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDesa.

2) Sekretaris Desa

Sekretaris desa selaku koordinator PTPKD membantu kepala desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa, dengan tugas: menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan APBDesa. Menyusun rancangan peraturan desa mengenai APBDesa, perubahan APBDesa dan pertanggungjawaban

pelaksanaan APBDesa. Melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBDesa. Menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa.

Melakukan verifikasi terhadap Rencana Anggaran Belanja (RAB), bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APBDesa (SPP).

3) Kepala urusan (Kaur) perencanaan

Kepala urusan (Kaur) perencanaan memiliki tugas yaitu mengkoordinasi urusan perencanaan, seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja Desa, melakukan monitoring dan evaluasi program, dan menginventarisir data-data dalam angka, serta penyusunan program.

4) Kepala urusan (Kaur) Tata usaha dan umum

Kepala urusan (Kaur) Tata usaha dan umum memiliki tugas melaksanakan berbagai ketatausahaan, misalnya administrasi surat-menyurat, penataan administrasi perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat, administrasi keuangan, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum.

5) Kepala urusan (Kaur) Keuangan

Tugas pokok kepala urusan keuangan adalah melaksanakan fungsi kebendaharaan dan membantu sekretaris desa dalam melaksanakan pengelolaan sumber pendapatan desa,

pengelolaan administrasi keuangan desa, dan mempersiapkan bahan penyusunan APBDesa.

6) Kepala Seksi (Kasi) Kesejahteraan

Kepala seksi kesejahteraan memiliki fungsi melaksanakan pembangunan sarana prasarana perdesaan, pembangunan bidang pendidikan, kesehatan dan tuas sosialisasi serta motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga dan karang taruna.

7) Kepala Seksi (Kasi) Pemerintahan

Kepala seksi pemerintahan memiliki fungsi melaksanakan manajemen tata praja pemerintahan, menyusun masalah rancangan regulasi desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, kependudukan, penataan dan pengelolaan wilayah, serta pendataan dan pengelolaan profil desa.

8) Kepala Seksi (Kasi) Pelayanan

Kepala seksi pelayanan memiliki fungsi melaksanakan penyuluhan dan motivasi terhadap pelaksanaan dan kewajiban masyarakat, meningkatkan upaya partisipasi masyarakat, pelestarian nilai sosial budaya masyarakat, keagamaan.

9) Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintah yang anggotanya merupakan terdiri dari wakil penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. Masa jabatan menjadi anggota badan permusyawaratan desa (BPD) selama 6 (enam) tahun, dengan masa keanggotaan paling banyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut atau tidak secara berturut-berturut.

c. Sumber Keuangan Desa

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah "sumber" diartikan sebagai tempat keluar atau asal dalam berbagai arti. Adapun "pendapatan" adalah hasil kerja (usaha) atau pencarian atau penemuan tentang sesuatu yang tidak ada sebelumnya. "Desa" dimaknai sebagai kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang mempunyai sistem pemerintahan sendiri yang di kepalai oleh seorang kepala desa. Desa di dalam mengurus dan mengatur urusan-urusan di atas yang mengharuskan adanya sumber keuangan desa.

Dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, telah disebutkan mengenai sumber pendapatan desa.

Desa mempunyai sumber pendapatan desa yang terdiri atas pendapatan asli desa, bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota, bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota, alokasi anggaran dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota, serta hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga.

d. Penggunaan Aplikasi Sistem Keuangan Desa

1) Pengertian Penggunaan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata penggunaan, mempunyai 4 pengertian, yaitu:

- Penggunaan adalah proses atau cara perbuatan pengguna.
- Penggunaan adalah proses melakukan kegiatan tertentu dengan menggunakan tenaga orang lain.
- Penggunaan adalah proses yang membantu merumuskan kebijakan dan tujuan organisasi.
- Penggunaan adalah proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan dan pencapaian tujuan.

Penggunaan secara umum merujuk pada cara atau metode seseorang atau kelompok memanfaatkan atau mengaplikasikan sesuatu, baik itu benda, alat, metode, teknologi, maupun sumber daya lainnya.

2) Pengertian Aplikasi Sistem Keuangan Desa

Aplikasi adalah program yang dibuat oleh pemakai yang ditujukan untuk melakukan suatu tugas khusus. Program aplikasi adalah program siap pakai atau program yang direkam untuk melaksanakan suatu fungsi bagi pengguna atau aplikasi yang lain. Aplikasi juga diartikan sebagai pengguna atau penerapan suatu konsep yang menjadi pokok pembahasan atau sebagai program komputer yang dibuat untuk menolong manusia dalam melaksanakan tugas tertentu.

Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) merupakan aplikasi yang dapat digunakan untuk membantu pemerintah desa mengelola keuangan desa mulai dari tahap perencanaan hingga tahap pelaporan atau pertanggungjawaban. Siskeudes dibuat oleh BPKP untuk membantu pemerintah desa mengelola keuangan desa.

Aplikasi ini menyediakan fitur-fitur yang dapat dengan mudah digunakan oleh operator untuk menjalankan aplikasi ini dengan baik sehingga dapat bermanfaat. Proses penginputan yang dilakukan disesuaikan dengan bukti transaksi sehingga dihasilkan output berupa dokumen administrasi dan laporan keuangan yang diperlukan

untuk pelaporan atau pertanggungjawaban atas penggunaan dana yang telah dianggarkan sebelumnya.

Tata cara penggunaan aplikasi Siskeudes dilakukan dengan permohonan penggunaan aplikasi Siskeudes dari Pemerintah Daerah kepada Kementerian Dalam Negeri atau perwakilan BPKP setempat dengan tujuan agar penggunaan aplikasi Siskeudes dapat diatur oleh Pemerintah Daerah sehingga dapat diterapkan pada seluruh desa di wilayah pemerintahan daerah yang bersangkutan.

Siskeudes adalah sebuah aplikasi untuk pembuatan anggaran, pembukuan, dan pelaporan keuangan desa yang disediakan oleh Pemerintah secara gratis. Aplikasi Siskeudes dapat membantu pemerintah kabupaten/kota untuk melakukan kompilasi, pengawasan, dan evaluasi RAPBDes. Setelah data dimasukkan, Siskeudes secara otomatis menghasilkan berbagai laporan yang diperlukan antara lain, dokumen penatausahaan, Bukti penerimaan, Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Surat Setoran Pajak (SSP) dan pelaporan, sehingga menghemat waktu dan biaya, mengurangi potensi kecurangan dan kesalahan manusia, dan membantu agregasi data.

Siskeudes sangat memberikan dampak pada para pegawai, yaitu memberikan motivasi untuk bekerja dengan baik dan benar, kegiatan operasional yang lebih terata secara administratif, mengurangi adanya kecurangan, meningkatkan kinerja pegawai, dan dapat menciptakan laporan keuangan yang akuntabel.

Penerapan aplikasi siskeudes sangat membawa perubahan yang baik, mempermudah dalam proses pelaporan pertanggungjawaban dan memberikan hasil peningkatan kualitas desa yang baik, menghasilkan pelaporan keuangan yang sesuai dengan waktu yang ditentukan, dan menghasilkan laporan keuangan yang akuntabel.

3. Transparansi

Pengertian Transparansi

Transparansi merupakan salah satu prinsip penting dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance). Transparansi berkaitan dengan keterbukaan pemerintah dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pengelolaan sumber daya publik. Dengan adanya transparansi, masyarakat dapat mengetahui, memahami, serta mengawasi setiap kebijakan dan kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah.

Menurut Mardiasmo, transparansi adalah keterbukaan pemerintah dalam memberikan informasi yang berkaitan dengan aktivitas

pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi tersebut.

Transparansi menuntut adanya penyediaan informasi yang jujur, terbuka, dan mudah diakses oleh masyarakat, sehingga memungkinkan publik untuk mengetahui dan mengevaluasi kinerja pemerintah.

Menurut Krina P. menyatakan bahwa transparansi adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan. Informasi tersebut meliputi kebijakan yang diambil, proses pembuatan kebijakan, hingga hasil yang dicapai. Dengan demikian, transparansi tidak hanya sekadar membuka informasi, tetapi juga memastikan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui dan memahami proses pemerintahan.

Menurut United Nations Development Programme, transparansi adalah ketersediaan informasi yang memadai, akurat, dan tepat waktu mengenai kebijakan publik, sehingga dapat diakses oleh masyarakat luas.

Transparansi dalam konteks ini menekankan pentingnya kualitas informasi, baik dari segi kejelasan, keakuratan, maupun ketepatan waktu penyampaian, agar informasi tersebut benar-benar bermanfaat bagi masyarakat. Selain itu, dalam konteks hukum di Indonesia, transparansi diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008

tentang Keterbukaan Informasi Publik. Dalam undang-undang tersebut dijelaskan bahwa setiap informasi publik pada dasarnya bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna informasi publik, kecuali informasi tertentu yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hal ini menunjukkan bahwa transparansi merupakan kewajiban bagi badan publik, termasuk pemerintah desa, dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat. Berdasarkan beberapa pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa transparansi adalah keterbukaan pemerintah dalam menyediakan informasi yang jujur, akurat, relevan, dan mudah diakses oleh masyarakat mengenai penyelenggaraan pemerintahan dan pengelolaan sumber daya publik. Transparansi juga mencerminkan adanya jaminan hak masyarakat untuk memperoleh informasi serta berperan dalam meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah.

Dalam konteks pemerintahan desa, transparansi menjadi sangat penting terutama dalam pengelolaan keuangan desa. Dengan adanya transparansi, masyarakat dapat mengetahui bagaimana dana desa direncanakan, digunakan, dan dipertanggungjawabkan. Hal ini akan mendorong terciptanya pemerintahan desa yang lebih terbuka, akuntabel, dan partisipatif.

4. Akuntabilitas

Pengertian Akuntabilitas

Akuntabilitas merupakan salah satu prinsip utama dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance), yang menekankan pada kewajiban setiap pihak yang diberi amanah untuk mempertanggungjawabkan segala tindakan dan kebijakan yang telah dilakukan kepada pihak yang berhak.

Menurut Mardiasmo dalam bukunya Akuntansi Sektor Publik, akuntabilitas adalah kewajiban pihak pemegang amanah (agent) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah (principal) yang memiliki hak untuk meminta pertanggungjawaban tersebut.

Menurut Indra Bastian dalam buku Akuntansi Sektor Publik, akuntabilitas diartikan sebagai kewajiban untuk menyampaikan pertanggungjawaban atau menjawab serta menerangkan kinerja dan tindakan seseorang atau badan hukum kepada pihak yang memiliki hak atau kewenangan untuk meminta keterangan tersebut.

Selain itu, Mahmudi dalam bukunya Manajemen Kinerja Sektor Publik menjelaskan bahwa akuntabilitas merupakan bentuk kewajiban organisasi sektor publik untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya.

Berdasarkan pendapat para ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas adalah kewajiban individu atau organisasi untuk mempertanggungjawabkan setiap tindakan, keputusan, dan penggunaan sumber daya kepada pihak yang memberikan amanah, yang dilakukan secara transparan, jujur, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dalam konteks pemerintahan desa, akuntabilitas sangat penting terutama dalam pengelolaan keuangan desa.

Pemerintah desa wajib menyusun laporan keuangan yang jelas, tepat, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat maupun kepada pemerintah yang lebih tinggi. Dengan adanya akuntabilitas, pengelolaan keuangan desa dapat berjalan secara tertib, transparan, dan terpercaya.

C. Kerangka Pemikiran

Pengelolaan keuangan desa merupakan bagian penting dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Desa memiliki kewenangan dalam mengatur dan mengelola keuangannya secara mandiri, sehingga dituntut untuk menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam setiap proses pengelolaan keuangan. Seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan penerapan konsep e-government, pemerintah mengembangkan sistem digital untuk mendukung tata kelola keuangan desa, salah satunya melalui Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) yang dikembangkan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) bersama

Kementerian Dalam Negeri. Aplikasi ini dirancang untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan desa agar lebih efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

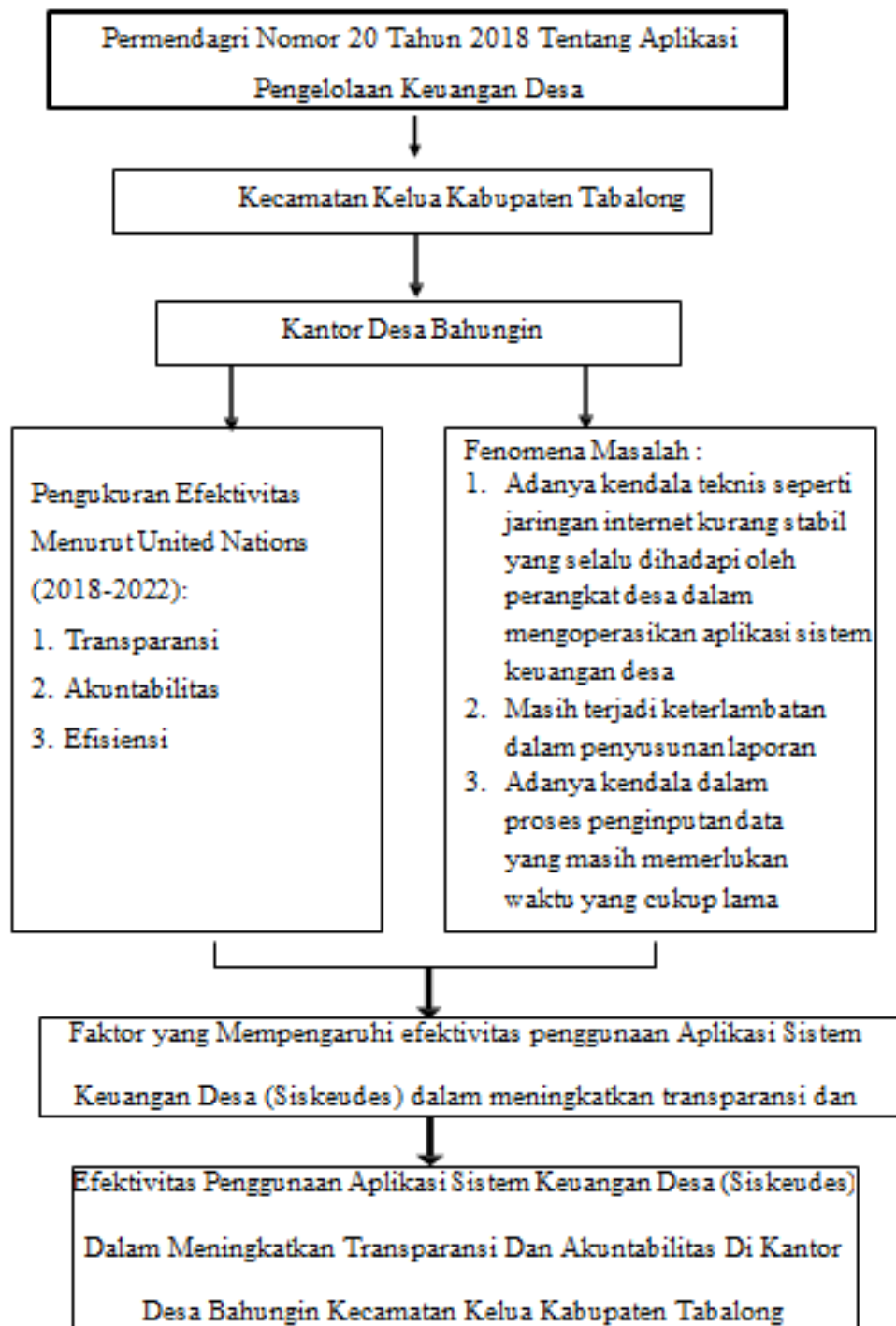
Menurut Uma Sekaran dalam Harbani Pasolong (2016:83) kerangka berpikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori yang berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting atau urgen, pada dasarnya kerangka berpikir adalah penjelasan sementara terhadap gejala yang menjadi objek permasalahan penelitian.

Berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Maka dalam penelitian ini, yang menjadi permasalahan utama dalam penerapan aplikasi Siskaudes yaitu:

1. Adanya kendala teknis seperti jaringan internet kurang stabil yang selalu dihadapi oleh perangkat desa dalam mengoperasikan aplikasi sistem keuangan desa. (*Sumber:Observasi Penulis, Tahun 2026*)
2. Masih terjadi keterlambatan dalam penyusunan laporan (*Sumber:Observasi Penulis, Tahun 2026*)
3. Adanya kendala dalam proses penginputan data yang masih memerlukan waktu yang cukup lama (*Sumber:Observasi Penulis, Tahun 2026*)

Berdasarkan uraian diatas maka penulis akan memberikan gambaran terhadap kerangka pemikiran dalam penelitian ini yang dapat dilihat pada gambar dibawah ini :

Gambar 2. 1
Kerangka pemikiran



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian ini dilakukan pada Kantor Desa Bahungin Kecamatan Kelua Kabupaten Tabalong yang berada di Jl. Ahmad Yani Desa Bahungin Kode pos 71552 Kecamatan Kelua. Adapun alasan yang menjadi pertimbangan pemilihan lokasi karena penulis melakukan observasi sehingga melihat ada permasalahan yang layak untuk diteliti terkait dengan judul yang penulis angkat.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah suatu mekanisme kerja penelitian yang mengandalkan uraian deskriptif kata, atau kalimat, yang disusun secara cermat dan sistematis mulai dari menghimpun data hingga menafsirkan dan melaporkan hasil penelitian.

Menurut Prof. Burhan Bungin dalam Ibrahim (2015:55) pendekatan kualitatif adalah proses kerja penelitian yang sarannya terbatas, namun kedalaman datanya tak terbatas. Semakin dalam data yang diperoleh atau dikumpulkan maka semakin berkualitas hasil penelitian tersebut.

Menurut Zuchri Abdussamad (2021:79) penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah, sebagai lawannya adalah eksperimen, dimana peneliti adalah sebagai *instrument* kunci.

Melalui pendekatan ini diharapkan peneliti mampu menghasilkan data atau informasi untuk mengungkapkan proses terjadinya lapangan yang bersifat alamiah yang dikumpulkan berupa pendapat, tanggapan, informasi, konsep-konsep, dan keterangan yang berbentuk uraian dalam mengungkapkan masalah, sedangkan datanya bersifat deskriptif yaitu data berupa gejala-gejala yang dikategorikan atau berupa bentuk lainnya seperti foto, dokumen, catatan lapangan pada saat penelitian dilakukan.

C. Tipe Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif yaitu memberikan gambaran atau menyajikan data sesuai dengan keadaan objek yang sebenarnya dengan harapan mendapatkan gambaran yang menyeluruh sesuai dengan tujuan penelitian yang hendak dicapai.

Menurut Sugiyono (2017:207). Metode deskriptif kualitatif adalah metode penelitian yang berdasarkan pada filsafat *postpositivisme* digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah (sebagai lawannya adalah *eksperimen*) dimana peneliti adalah sebagai *instrument* kunci teknik pengumpulan data dilakukan secara trigulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi. Penelitian deskriptif kualitatif bertujuan untuk menggambarkan, melukiskan, menerangkan, menjelaskan dan menjawab secara lebih rinci permasalahan yang akan diteliti dengan mempelajari semaksimal mungkin seorang individu, suatu kelompok atau suatu kejadian.

Dalam penelitian kualitatif manusia merupakan instrumen penelitian dan hasil penulisannya berupa kata-kata atau pernyataan yang sesuai dengan keadaan sebenarnya.

Menurut Sugiyono dalam Zuchri Abdussamad (2021:80-81). Metode deskriptif kualitatif adalah metode penelitian yang berdasarkan pada filsafat *postpositivisme* digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah (sebagai lawannya adalah *eksperimen*) dimana peneliti adalah sebagai *instrument* kunci teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.

Penelitian deskriptif kualitatif bertujuan untuk menggambarkan, melukiskan, menerangkan, menjelaskan dan menjawab secara lebih rinci permasalahan yang akan diteliti dengan mempelajari semaksimal mungkin seorang individu, suatu kelompok atau suatu kejadian. Dalam penelitian kualitatif manusia merupakan instrumen penelitian dan hasil penulisannya berupa kata-kata atau pernyataan yang sesuai dengan keadaan sebenarnya.

D. Data dan Sumber Data

Data dan sumber data dalam penelitian merupakan faktor yang sangat penting, karena menyangkut kualitas dari hasil penelitian. Oleh karenanya data dan sumber data menjadi bahan pertimbangan dalam metode pengumpulan data.

1. Data

a. Data Primer

Menurut Zulkarnain Lubis, dkk (2019:61) Data primer adalah data yang diperoleh langsung oleh pengumpul data dari objek

penelitiannya dan pengumpulan data dilakukan khusus untuk kepentingan penelitian tersebut.

Menurut Bungin dalam buku Ibrahim (2015:71) mendefinisikan data primer sebagai data yang diambil dari sumber primer atau sumber pertama di lapangan.

Data primer adalah data yang dikumpulkan langsung oleh peneliti dari sumber pertama untuk menjawab rumusan masalah penelitian.

Berikut sumber data primer :

- Wawancara

Kepala desa

Sekretaris desa

Kaur keuangan / operator Siskeudes

BPD (Badan Permusyawaratan Desa)

- Observasi langsung

Proses penggunaan aplikasi Siskeudes

Kegiatan pengelolaan keuangan desa

- Dokumentasi lapangan

Aktivitas input data, pelaporan, dll

Dalam penelitian kualitatif, sumber data juga diperjelas melalui informan, seperti:

- Aparat desa

- Pendamping desa

- Masyarakat

b. Data Sekunder

Menurut Bungin dalam buku Ibrahim (2015:72) Data Sekunder adalah segala bentuk dokumen, baik dalam bentuk tertulis maupun foto atau sumber data kedua sesudah sumber data primer.

Menurut Amirin dalam buku Rahmadi (2011:71) Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber yang bukan asli memuat informasi atau data yang dibutuhkan.

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber yang sudah ada atau terdokumentasi. Berikut sumber data sekunder:

- Dokumen resmi desa

APBDes (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa)

Laporan realisasi anggaran

Laporan keuangan desa

- Arsip dari aplikasi Siskeudes

Data input keuangan

Laporan output sistem

- Peraturan dan kebijakan

Permendagri No. 20 Tahun 2018

Pedoman pengelolaan keuangan desa

- Literatur

Buku, Jurnal ilmiah dan Skripsi terdahulu

Penelitian Siskeudes juga menggunakan data sekunder dari dokumen dan laporan keuangan desa serta referensi ilmiah.

2. Sumber Data

Salah satu pertimbangan dalam memilih masalah penelitian adalah ketersediaan sumber data. Yang dimaksud sumber data adalah semua keterangan seseorang yang dijadikan responden (informan) maupun yang berasal dari dokumen-dokumen, baik dalam bentuk statistik atau dalam bentuk lainnya guna keperluan ketelitian.

Informan penelitian adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar belakang penelitian.

Dalam penelitian kualitatif tidak mempersoalkan jumlah informan, tetapi bisa bergantung dari tepat tidaknya pemilihan informan kunci dan kompleksitas dari keragaman fenomena sosial yang diteliti.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik purposive sampling dalam mengambil data. Menurut Sugiyono (2017:119) Purposive sampling adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini misalnya orang tersebut yang dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan, sehingga memudahkan peneliti menjelajahi objek atau situasi sosial yang diteliti.

Berikut Data Informan Penelitian :

Tabel 3. 1
Data Informan Penelitian

NO	NAMA INFORMAN	JABATAN	KET
1	Drs. Muhammad Nasib	Kepala Desa	1 Orang
2	Murni, S. AP	Sekretaris Desa	1 Orang
3	Fakhrijal Mujaza	Operator Siskeudes	1 Orang
4	Jumri	Ketua BPD	1 Orang
5	Ery Koeswari, S. AP	Aparat Desa	1 Orang
6	Andi	Masyarakat	1 Orang
7	Marzuki	Masyarakat	1 Orang
8	Mini	Masyarakat	1 Orang
9	Asih	Masyarakat	1 Orang
10	Hartono	Masyarakat	1 Orang

Sumber Data: Diolah Peneliti Tahun 2026

E. Desain Operasional Penelitian

Desain operasional merupakan penjabaran konsep penelitian dalam membatasi fenomena yang akan diteliti, sehingga dapat dijadikan petunjuk tentang bagaimana suatu konsep dapat dibatasi dengan menggunakan indikator konkrit. Dengan kata lain desain operasional berbicara tentang bagaimana menurunkan gagasan-gagasan konsep abstrak ke dalam indikator empiris yang sesuai dengan kondisi yang sebenarnya.

Berdasarkan teori yang relevan terkait efektivitas seperti dikemukakan oleh United Nations (2018-2022) Teori E-Government Modern menjelaskan bahwa pemanfaatan teknologi informasi dalam pemerintahan bertujuan untuk meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), melalui penerapan sistem digital dalam pelayanan publik dan administrasi pemerintahan.

Menurut United Nations (2018-2022), e-government tidak hanya berfokus pada penggunaan teknologi, tetapi juga pada peningkatan:

- 1) Transparansi
- 2) Akuntabilitas
- 3) Efisiensi

Dalam konteks ini, aplikasi Siskeudes merupakan bentuk implementasi e-government di tingkat desa yang digunakan untuk mengelola keuangan desa secara digital.

Secara umum, penggunaan Siskeudes di Kantor Desa Bahungin sebagai berikut:

- Meningkatkan transparansi, karena data keuangan desa dapat disusun secara sistematis dan lebih mudah diakses
- Mendorong akuntabilitas, karena setiap transaksi keuangan tercatat dan dapat dipertanggungjawabkan
- Meningkatkan efisiensi, karena proses pencatatan dan pelaporan menjadi lebih cepat dibandingkan manual.

Tabel 3. 2
Desain Operasional Penelitian

Variabel	Sub Variabel	Indikator
Pengukuran efektivitas Menggunakan Teori E-Goverment Menurut United Nations (2018-2022)	1. Transparansi	a. Keterbukaan laporan keuangan desa b. Penyediaan Media informasi
	2. Akuntabilitas	a. Pertanggungjawaban dana desa b. Ketepatan waktu pelaporan
	3. Efisiensi	a. Pelayanan administrasi lebih cepat b. Penghematan waktu kerja

Sumber Data: Diolah Peneliti Tahun 2026

F. Teknik Pengumpulan Data

Menurut Sugiyono (2019:296) Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan. Jadi penulis menggunakan teknik penelitian sebagai berikut:

1. Observasi

Menurut Harbani Pasolong (2016:130) observasi atau pengamatan adalah teknik (cara) yang pertama kali digunakan dalam penelitian ilmiah. Kegiatan penelitian ilmiah pada awalnya ditujukan untuk memperoleh sebanyak mungkin pengetahuan tentang lingkungan manusia, sesudah itulah penelitian ilmiah diterapkan

untuk memperoleh pengetahuan ilmiah tentang kegiatan manusia dalam hubungannya satu sama lain, termasuk masalah yang ditimbulkannya.

Menurut Sahya Anggara dalam buku Metode Penelitian Administrasi (2015:109). Observasi merupakan teknik pengamatan dan pencatatan sistematis dari fenomena yang diselidiki.

Observasi dilakukan untuk menemukan data dan informasi dari gejala-gejala atau fenomena (kejadian) secara sistematis dan didasarkan pada tujuan penyelidikan yang telah dirumuskan.

2. Wawancara

Menurut Muhammad Ali dalam Sahya Anggara (2015:113) mengemukakan bahwa wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan kepada responden, dan jawaban responden dicatat atau direkam.

Menurut Kartono dalam Imam Gunawan (2015:160) terdapat dua pihak dengan kedudukan yang berbeda dalam proses wawancara yaitu pihak pertama berfungsi sebagai penanya, disebut pula sebagai *interviewer*, sedangkan pihak kedua berfungsi sebagai pemberi informasi (*information supplyer*), atau informan.

Menurut Sugiyono (2019:195) wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit/kecil.

3. Dokumentasi

Menurut Riduwan (2015:31) dokumentasi adalah ditujukan untuk memperoleh data langsung dari tempat penelitian, meliputi buku-buku yang relevan, peraturan-peraturan, laporan kegiatan, foto-foto, film dokumenter, data yang relevan digunakan.

Menurut Sugiyono dalam Imam Gunawan (2015:176) dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu yang berbentuk tulisan, gambar, atau karya monumental.

Dokumentasi berasal dari kata dokumen, yang artinya tertulis, benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen peraturan-peraturan, notulen rapat dan sebagainya. (Dalam Mamik 2015:97).

G. Teknik Analisis Data

Miles and Huberman dalam Sugiyono (2019:322-329), mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data, yaitu data *reduction*, data *display*, dan *conclusion drawing/verification*.

1. Data *Reduction* (Reduksi Data)

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan, perhatian pada penyederhanaan, pengabstraksian, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.

2. *Data Display* (Penyajian Data)

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. Penyajian data yang paling sering digunakan untuk data kualitatif pada masa lalu adalah bentuk teks naratif dalam puluhan, ratusan, atau bahkan ribuan halaman.

Akan tetapi teks naratif dalam jumlah besar melebihi beban kemampuan manusia dalam memproses informasi dan menggerogoti kecenderungan - kecenderungan mereka untuk menemukan pola - pola sederhana.

3. *Conclusion Drawing* (Menarik Kesimpulan)

Langkah selanjutnya dalam penelitian analisis data kualitatif adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti- bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

H. Uji Kredibilitas Data

Menurut Sugiyono (2019:365-371) uji kredibilitas data atau kepercayaan terhadap data hasil penelitian kualitatif antara lain dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Perpanjang Pengamatan

Perpanjangan pengamatan yaitu langkah peneliti kembali ke lapangan melakukan pengamatan dari wawancara dengan sumber data yang pernah

ditemui maupun sumber data yang baru, hal ini bertujuan untuk menumbuhkan keakraban (tidak ada jarak lagi, semakin terbuka, dan saling mempercayai) antara peneliti dengan narasumber sehingga tidak ada informasi yang disembunyikan lagi.

2. Meningkatkan Ketekunan

Meningkatkan ketekunan berarti melakukan pengamatan secara lebih cermat dan berkesinambungan, dengan cara tersebut maka kepastian data dan urutan peristiwa akan dapat direkam secara pasti dan sistematis. Selain itu, penulis dapat melakukan pengecekan kembali apakah data yang telah ditemukan itu salah atau tidak. Penulis dapat memberikan deskripsi data yang akurat dan sistematis tentang apa yang diamati.

3. Triangulasi

Triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu. Terdapat triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data dan waktu. Triangulasi sumber dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber, triangulasi teknik dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda dan triangulasi waktu dilakukan dengan cara melakukan pengecekan dengan wawancara, observasi atau teknik lain dalam waktu atau situasi yang berbeda.

4. Analisis Kasus Negatif

Kasus negatif adalah kasus yang tidak sesuai atau berbeda dengan hasil penelitian. Melakukan analisis kasus negatif berarti penulis mencari

data yang berbeda atau bahkan bertentangan dengan data yang telah ditemukan, bila tidak ada lagi data yang berbeda atau bertentangan dengan temuan berarti data yang ditemukan sudah dapat dipercaya. Tetapi bila penulis masih mendapatkan data-data yang bertentangan dengan data yang ditemukan maka penulis mungkin akan mengubah dari seberapa kasus negatif yang muncul tersebut.

5. Menggunakan Bahan Referensi

Bahan referensi disini adalah adanya pendukung untuk membuktikan data yang telah ditemukan oleh penulis. Contoh data hasil wawancara perlu didukung dengan adanya rekaman wawancara, data tentang interaksi manusia atau gambaran suatu keadaan perlu didukung oleh foto-foto. Alat-alat bantu perekam data dalam penelitian kualitatif sangat diperlukan untuk mendukung kredibilitas data yang telah ditemukan oleh penulis

6. Mengadakan *Memberchek*

Memberchek adalah proses pengecekan data yang diperoleh penulis kepada pemberi data. Tujuan *memberchek* adalah untuk mengetahui seberapa jauh data yang diperoleh sesuai dengan apa yang diberikan oleh pemberi data. Apabila data yang ditemukan disepakati oleh pemberi data berarti data tersebut valid, sehingga semakin kredibel atau dipercaya. Tetapi, apabila data yang ditemukan penulis dengan berbagai penafsirannya tidak disepakati oleh pemberi data dan tidak sesuai informan maka penulis perlu melakukan diskusi dengan pemberi data untuk memberikan koreksi. Data yang telah dikoreksi itulah yang peneliti jadikan sebagai data dalam penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Amrizal, Dedi, dkk. 2018. *Pengukuran Kinerja Organisasi Sektor Publik*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Annas, Aswar, 2017. *Manajemen Pelayanan Publik*. Makassar: Pustaka Pelajar.
- Anonim 2018. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- Anonim 2014. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Anonim 2008. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- Bastian, Indra, 2010. *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Erlangga.
- Bawono, Ick Rangga dan Erwin Setyadi, 2019. *Pengelolaan Keuangan Desa*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Dunn, William N, 2003. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Ekasari, Ratna, 2020. *Manajemen Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Gie, The Liang, 2000. *Administrasi Perkantoran Modern*. Yogyakarta: Liberty.
- Heri, Eko Indra, 2020. *Analisis Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Herliana, Mely, 2021. *Efektivitas Penerapan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) dalam Pengelolaan Laporan Keuangan Desa di Kecamatan Embaloh Hilir Kabupaten Kapuas Hulu*. Skripsi. Universitas Jenderal Soedirman.

Mahmudi, 2015. *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.

Mardiasmo, 2018. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi.

Pasolong, Harbani, 2022. *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta.

Pasolong, Harbani, 2016. *Metode Penelitian Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta.

Purwanti, Dian, 2022. *Efektivitas Organisasi dan Pelayanan Publik*. Bandung: Refika Aditama.

United Nations Development Programme (UNDP). 1997. *Governance for Sustainable Human Development*. New York: UNDP.

United Nations. (2018). United Nations E-Government Survey 2018: *Gearing E-Government to Support Transformation towards Sustainable and Resilient Societies*. New York: United Nations.

Wahid, Abdurrahman, 2023. *Efektivitas Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Pada Kantor Desa Pematang Kecamatan Banua Lawas Kabupaten Tabalong*. Skripsi. STIA Amuntai.

Wardani, Rinni, 2024. *Pengantar Manajemen: Teori dan Aplikasi*. Jakarta: Kencana.

Wijayanti, Asri, dkk. 2018. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Salemba Empat.

Wulandari, Niken, dkk. 2024. *Manajemen Organisasi*. Bandung: Alfabeta.

Yuliani, Kartika Febri, 2017. *Manajemen Sumber Daya Manusia Sektor Publik*. Yogyakarta: Deepublish.

Zohriah, Anis, 2023. *Teori Administrasi Publik*. Jakarta: Prenadamedia Group.